

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sasaran Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals*) adalah Deklarasi Millennium hasil kesepakatan yang ditandatangani oleh kepala negara dan perwakilan dari 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada saat Konferensi Tingkat Tinggi tahun 2000. Tujuan pembangunan masyarakat terurai dalam deklarasi milenium yang ditargetkan tercapai pada tahun 2015. Isi dari kesepakatan ini adalah delapan butir tujuan yang ingin dicapai oleh setiap Negara, yakni menanggulangi kemiskinan, tercapai pendidikan dasar untuk semua, mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi penyakit menular, memastikan kelestarian lingkungan hidup dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Target ini merupakan tantangan utama yang umum dalam pembangunan di seluruh dunia.

Salah satu tujuan MDGs adalah menanggulangi kemiskinan dan mencapai pendidikan dasar untuk semua. Di Indonesia, nampaknya kemiskinan masih menjadi permasalahan sosial yang besar. Karena kemiskinan banyak anak-anak yang tidak bisa mengenyam pendidikan yang layak, banyak keluarga yang tidak bisa membiayai kesehatannya, kurangnya akses lapangan pekerjaan, dan kemiskinan membuat jutaan rakyat tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan yang menimbulkan masalah baru yaitu kelaparan.

Tujuan dari pendidikan dasar untuk semua yaitu menjamin pada tahun 2015 semua anak dimanapun, laki-laki maupun perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasar. Untuk mencapai tujuan itu, Indonesia berupaya menurunkan angka buta aksara penduduk 15 tahun keatas menjadi 5% pada tahun 2015.

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengembangkan sumber daya manusia, dan merupakan hak bagi setiap warga negara dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam kaitannya dengan pendidikan, dijelaskan dalam Undang Undang

No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 ayat (3), berbunyi:

Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Kondisi warga masyarakat penyandang buta aksara pada tataran Nasional masih cukup banyak. Jumlah warga masyarakat penyandang buta aksara di Indonesia masih cukup tinggi. Pada tahun 2011, menurut data BPS, jumlah buta aksara usia 15-59 tahun berjumlah 7.546.344 orang. Dari jumlah tersebut sebagian besar tinggal di pedesaan seperti petani kecil, buruh, nelayan dan masyarakat kelompok miskin perkotaan yaitu buruh berpenghasilan rendah atau penganggur. Kondisi ini tentunya akan memberikan kontribusi terhadap rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia di Negara kita, jika hal ini tidak ditangani secara serius.

Sebenarnya, upaya untuk mengangkat manusia sebagai tujuan utama pembangunan telah muncul dengan lahirnya "*basic needs development*" dimana, untuk mengukur keberhasilan pembangunan dengan Indeks Mutu Hidup (*Physical Quality of Life*) yang memiliki tiga parameter yaitu : Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Harapan Hidup (AHH) dan Tingkat Melek Huruf (AMH).

Pembangunan Masyarakat (PM) adalah salah satu metode pekerjaan sosial yang tujuan utamanya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial. Suharto (2010:58) menyatakan bahwa:

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka

perluan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya pengentasan penduduk buta aksara sangat penting dalam pembangunan manusia. Prioritas pemberantasan buta aksara dalam pembangunan pendidikan, didasari oleh pertimbangan : (1) satu-satunya cara meningkatkan HDI yang paling murah dan cepat adalah dengan cara menurunkan jumlah buta aksara secara signifikan; (2) tingkat keaksaraan penduduk suatu negara sangat mempengaruhi tingkat kesehatan, gizi, kematian ibu dan anak, kesejahteraan dan angka harapan hidup; (3) pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara, oleh sebab itu penduduk yang masih buta aksara wajib dan prioritas memperoleh layanan pendidikan; (4) penyandang buta aksara erat kaitan dengan kebodohan, keterbelakangan, pengangguran, dan ketidakberdayaan menjadi miskin yang bermuara pada rendahnya produktivitas penduduk. (Suryadi, 2007)

Penuntasan angka buta huruf terutama untuk kelompok produktif dibutuhkan sistem dan model pembelajaran masal, mustari, menarik dan mumpuni yang mampu memberdayakan warga belajar sehingga *out put* pendidikan keaksaraan tidak saja mampu mencapai standar kompetensi keaksaraan tingkat dasar dalam kemampuan calistung saja, melainkan sistem dan model pembelajaran tersebut harus memberdayakan warga belajar untuk dapat mengembangkan kompetensi dasar tersebut secara berkelanjutan kearah kemampuan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.

Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa setelah mengikuti pendidikan keaksaraan dasar pada umumnya masih merasa sulit keluar dari jerat kebodohan, kemiskinan dan ketidakberdayaan. Hal ini disebabkan karena setelah selesai mengikuti pendidikan keaksaraan, mereka belum memiliki kesempatan untuk memelihara dan mengembangkan kemampuan keaksaraan fungsional bagi peningkatan kualitas diri dan kehidupannya. Oleh karena itu, warga belajar yang telah melek aksara perlu dikembangkan lagi kompetensi keaksaraannya melalui program pendidikan keaksaraan yang dapat membantu dirinya untuk

mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.

Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) merupakan salah satu program yang dikembangkan. Tujuan utama dari program KUM ini adalah untuk meningkatkan keberdayaan penduduk buta aksara usia 15-59 tahun melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan agar mampu berusaha secara mandiri.

Salah satu lembaga yang sudah melaksanakan program Keaksaraan Usaha Mandiri dan telah meluluskan 80 warga belajar adalah PKBM Kinanti yang berlokasi di Kampung Babakan Ampera Desa Jayagiri Lembang Kabupaten Bandung Barat. Warga belajar di PKBM Kinanti, mayoritas tergolong usia dewasa yang produktif yakni berusia 25 tahun keatas dengan indikator: a) berpendidikan rendah b) buta aksara c) pengangguran d) ekonomi lemah dan e) tidak memiliki keterampilan. Sehingga diperlukan berbagai upaya yang dilakukan oleh warga belajar dan berbagai lembaga yang pendidikan nonformal dalam memenuhi ke lima indikator tersebut.

Maka dari itu, PKBM Kinanti mencoba mengupayakan berbagai cara, agar warga belajar KUM tidak hanya sekedar melek aksara saja, tetapi diupayakan agar dapat berdaya yang nantinya akan mengarah pada pemberdayaan secara pengetahuan, keterampilan, dan ekonomi. Diantara dengan memberikan bantuan modal, pembelajaran KUM yang didalamnya melatih kembali keberaksaraan dan pelatihan-pelatihan keterampilan, dan pendampingan dalam merintis usaha.

Hasil dari upaya yang dilakukan PKBM Kinanti dalam memberikan motivasi warga belajar untuk mengikuti program ini, dapat ditinjau dari minat atau keinginan warga belajar yang berorientasi pada pemecahan masalah. Selain itu, warga belajar juga sangat antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, adanya warga belajar yang sudah mulai menjalankan usaha baik secara individu maupun kelompok, dan adanya komunikasi antara warga belajar dengan tutor atau pengelola PKBM.

Merujuk pada paparan di atas, upaya yang dilakukan oleh PKBM Kinanti di Kampung Babakan Ampera sudah tepat, karena berdasarkan kebutuhan bagi warga belajar khususnya dan masyarakat pada umumnya. Namun kebenarannya

perlu diketahui melalui penelitian. Dalam penelitian ini penulis mencoba mencari jawaban mengenai Hubungan Pembelajaran KUM, Modal Usaha, dan Pendampingan Perintisan Usaha dengan Kemandirian Usaha Warga Belajar KUM di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kinanti Lembang.

## **B. Identifikasi Masalah**

Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan pengamatan terlebih dahulu. Berikut adalah identifikasi masalah yang peneliti temukan :

1. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kinanti berada di lingkungan masyarakat yang mayoritas berpendidikan rendah, buta aksara, pengangguran, ekonomi rendah, dan tidak memiliki keterampilan.
2. Adanya perubahan pola pikir warga belajar terhadap pentingnya pendidikan dan kewirausahaan setelah mengikuti pembelajaran KUM.
3. Modal usaha yang dimiliki warga belajar sudah bisa digunakan sebagai modal awal untuk mendirikan usaha. Namun, warga belajar belum sepenuhnya mampu untuk mengelola modalnya.
4. Terdapat motivasi positif yang diterima oleh para warga belajar melalui proses pendampingan perintisan usaha untuk memulai suatu usaha yang dilakukan secara mandiri maupun usaha secara berkelompok.
5. Pendampingan perintisan usaha mengarahkan warga belajar untuk mendirikan usaha yang sesuai dengan modal dan kemampuannya.
6. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kinanti juga memiliki beberapa unit usaha yang melibatkan warga belajar sebagai karyawan.

## **C. Perumusan dan Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, menunjukkan faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian dalam usaha, bisa jadi diantaranya merupakan faktor intrinsik yaitu (tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan dan motivasi) dan faktor ekstrinsik (kompensasi, fasilitas, dan hubungan sosial). Namun menyadari keterbatasan waktu dan kemampuan, penulis memandang perlu memberikan batasan masalah yang jelas dan terfokus. Faktor-faktor yang dikaji dalam skripsi ini yang dianggap

memiliki hubungan dengan kemandirian usaha adalah pembelajaran, modal usaha, dan pendampingan perintisan usaha.

Berdasarkan pembatasan masalah, maka yang menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah: Adakah hubungan antara pembelajaran, modal usaha, dan pendampingan perintisan usaha dengan kemandirian usaha warga belajar KUM?.

Berikut ini dikemukakan beberapa pertanyaan penelitian yang diharapkan dapat dijawab oleh penelitian yang dilaksanakan. Pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Adakah hubungan antara pembelajaran dengan kemandirian usaha warga belajar KUM di PKBM Kinanti?
2. Adakah hubungan antara modal usaha dengan kemandirian usaha warga belajar KUM di PKBM Kinanti?
3. Adakah hubungan antara pendampingan perintisan usaha dengan kemandirian usaha warga belajar KUM di PKBM Kinanti?
4. Adakah hubungan antara pembelajaran KUM, pemberian modal usaha, dan pendampingan perintisan usaha dengan kemandirian usaha warga belajar KUM di PKBM Kinanti?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan dan batasan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hubungan antara pembelajaran dengan kemandirian usaha warga belajar
2. Untuk mengetahui hubungan antara modal usaha dengan kemandirian usaha warga belajar.
3. Untuk mengetahui hubungan antara pendampingan perintisan usaha dengan kemandirian usaha warga belajar.
4. Untuk mengetahui hubungan antara pembelajaran, modal usaha, dan pendampingan perintisan usaha dengan kemandirian usaha warga belajar.

## **E. Manfaat Penelitian**

### 1. Dari segi teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pendidikan dan memperkaya hasil penelitian yang telah ada dan member gambaran mengenai hubungan antara pembelajaran KUM, modal usaha, dan pendampingan perintisan usaha dengan kemandirian usaha warga belajar dalam pelaksanaan program Keaksaraan Usaha Mandiri.

### 2. Dari segi kebijakan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan masukan bagi pengambil kebijakan agar upaya pemberantasan keaksaraan, pengangguran dan kemiskinan dapat di implementasikan di lembaga-lembaga pendidikan non formal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan lembaga-lembaga pendidikan non formal lainnya secara merata.

### 3. Dari segi praktis

Penelitian ini dapat menjadi masukan dan rujukan bagi tutor dan pengelola PKBM Kinanti agar lebih memperhatikan baik itu teknik dan metode pembelajaran maupun teknik dan metode pendampingan. Sehingga, warga belajar program Keaksaraan Usaha Mandiri khususnya mampu memanfaatkan keberaksaraannya agar mampu berusaha secara mandiri dan masyarakat kampung babakan ampera umumnya menjadi masyarakat yang berpendidikan tinggi, memiliki usaha/pekerjaan, melek aksara, memiliki penghasilan dan memiliki keterampilan yang beragam.

### 4. Dari segi isu serta aksi sosial

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi awal untuk mengurangi isu-isu mengenai pengangguran dan kemiskinan yang berkembang saat ini karena tingkat keberaksaraan yang masih rendah dapat menjadi penghambat bagi individu untuk mengakses berbagai informasi yang ada agar mampu bangkit dari kemiskinan dan keterpurukan dalam kehidupannya. Setiap warga masyarakat perlu memiliki keberaksaraan termasuk kecakapan keberaksaraan yang didalamnya termasuk juga kecakapan ekonomi untuk berusaha mandiri. Oleh karena itu, keaksaraan usaha mandiri merupakan penguatan keberaksaraan melalui

pembelajaran keterampilan kewirausahaan untuk meningkatkan penghasilan dan produktivitasnya.

#### **F. Sistematika Penulisan`**

Untuk memperdalam pembahasan dan penyusunan selanjutnya, maka penulis memberikan gambaran umum tentang isi dan materi yang akan dibahas, yakni:

Bab I Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Kajian pustaka yang berisi tentang kajian mengenai konsep pembelajaran, konsep keaksaraan fungsional, konsep program Keaksaraan Usaha Mandiri, konsep modal, konsep pendampingan, konsep kemandirian, konsep kewirausahaan, dan hipotesis.

Bab III Metode penelitian yang membahas tentang, lokasi dan subjek, populasi/sampel penelitian, desain penelitian, metode penelitian, variabel penelitian, instrumen penelitian, proses pengembangan instrumen, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan membahas tentang bagaimana hasil penelitian di lapangan dan membahasnya.

Bab V Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.